



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Hendri Gunawan^{1*}, Sandrayati², Rosy Armaini³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

* E-mail Korespondensi: hendrigunawanj4r@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 09-07-2025

Revision: 29-07-2025

Published: 04-12-2025

DOI Article:

[10.24905/permana.v17i3.1049](https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1049)

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) terhadap pengeluaran bantuan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera dijadikan sebagai populasi penelitian. Melalui metode sampling jenuh, diperoleh sebanyak 50 sampel dengan total 200 observasi data tahunan. Data sekunder dikumpulkan melalui publikasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan serta membuktikan bahwa secara parsial, PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan sosial, sementara variabel P-SiLPA tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen ini tersebut terbukti berpengaruh terhadap pengeluaran bantuan sosial sebagai variabel dependen.

Kata Kunci: PAD, Dana Perimbangan, P-SiLPA, Belanja Bantuan Sosial

A B S T R A C T

This study investigates the extent to which Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and P-SiLPA affect Social Assistance Expenditures in provincial governments across Sumatra Island. Employing a descriptive quantitative approach, the research utilized a saturated sampling technique, incorporating all available data to obtain 50 samples and 200 observations. Data were sourced from the official website of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) and analyzed using SPSS version 30. The results indicate that PAD and Balancing Funds exert a significant partial influence on Social Assistance Expenditures. In contrast, P-SiLPA does not demonstrate a statistically significant effect. Nevertheless,

Acknowledgment

1196



simultaneous testing confirms that the three independent variables collectively have a significant impact on Social Assistance Expenditures, suggesting that overall fiscal capacity plays a critical role in determining social spending allocations.

Key word: *Regional Original Revenue, Balancing Funds, P-SiLPA*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Banyak masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar harian karena tingkat pendapatan yang rendah. Permasalahan ini semakin diperparah oleh ketimpangan dalam mengakses serta mendapatkan fasilitas layanan-layanan publik penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Keterbatasan tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya. Di samping itu, minimnya kesempatan kerja membuat sebagian besar penduduk bergantung pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan kestabilan ekonomi. Situasi ini menjadikan angka kemiskinan sulit ditekan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menggambarkan kondisi tersebut secara gamblang. Beberapa provinsi di wilayah Sumatera, seperti Aceh dan Bengkulu, masing-masing mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 14,45% dan 14,62%, jauh berada di atas rata-rata angka nasional yaitu pada angka 9,36% (BPS, 2023). Upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial juga tidak terlepas dari tantangan, salah satunya adalah potensi penyimpangan karena campur tangan politik. Menurut Nurcahyo (2021), penyaluran bantuan sosial kerap dijadikan instrumen politik menjelang pemilihan kepala daerah, yang berdampak pada distribusi yang tidak merata serta kurang tepat sasaran (Nurcahyo, 2021).

Dari sisi regulasi, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pengeluaran negara yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, baik dalam bentuk tunai, barang, maupun pelayanan dasar. Tujuan utama dari program ini adalah memperkuat ketahanan ekonomi penerima, memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019

1197



tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial, 2019). Selain itu, kelompok penerima bantuan mencakup individu, keluarga, komunitas, maupun kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan akibat bencana alam, konflik sosial, krisis ekonomi, ataupun tekanan politik. Dalam implementasinya, program ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar minimal masyarakat yang menjadi sasaran, sebagaimana tercantum dalam ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni metode ilmiah yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui tahapan analisis yang sistematis, objektif, serta dapat diuji secara empiris. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, mulai dari 2019 hingga 2023, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta tren yang berkelanjutan terkait pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial di tingkat pemerintah daerah. Rentang waktu tersebut diharapkan mampu menggambarkan dinamika jangka menengah, bukan hanya cerminan situasi sesaat.

Adapun data yang digunakan atau diapakai dalam penelitian ini berasal dari sumbernya dari dokumen-dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan pemerintah provinsi, serta berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tingkat provinsi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik, yang mencakup uji hipotesis, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t (parsial), dan uji F (simultan), dengan dukungan perangkat lunak SPSS versi terkini. Populasi penelitian mencakup sepuluh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Teknik penarikan sampel dilakukan melalui metode nonprobability sampling, yaitu pendekatan pemilihan sampel yang tidak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk yang terpilih, dengan mempertimbangkan kemudahan akses serta ketersediaan data keuangan daerah yang relevan dengan fokus penelitian ini.

HASIL



Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	50	20.23	29.61	28.3267	1.33552
LN_X2	50	27.99	29.65	28.8103	.45135
LN_X3	50	.09	28.95	27.2316	3.93176
LN_Y1	50	18.41	26.66	23.1888	2.04610
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1, penelitian ini melibatkan 10 unit observasi yang dianalisis selama lima tahun, sehingga total data observasi yang digunakan dalam analisis berjumlah 50. Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu Belanja Bantuan Sosial (Y), menunjukkan nilai tertinggi sebesar 26,66 dan nilai terendah sebesar 18,41, dengan rata-rata sebesar 23,1888. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD/X1), nilai maksimum tercatat sebesar 29,61, sedangkan nilai minimumnya adalah 20,23, dengan rata-rata 28,3267. Variabel Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai maksimum 29,65 dan minimum 27,99, serta nilai rata-rata yang sama dengan PAD, yaitu sebesar 28,3267. Sementara itu, variabel Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA/X3) menunjukkan nilai tertingginya yaitu sebesar 28,95 dan nilai terendahnya yaitu sebesar 0,09, dengan rata-ratanya sebesar 27,2316.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50503423
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.065
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.071
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.070
	99% Confidence Interval	.064
	Lower Bound	
	Upper Bound	.077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

1199

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 2, uji normalitas yang dilakukan dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,71. Karena angka ini sudah melebihi batas signifikansi yaitu pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar normalitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa adanya indikasi penyimpangan distribusi data yang berarti.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_X1	.850	1.176
	LN_X2	.848	1.179
	LN_X3	.997	1.003

a. Dependent Variable: LN_Y1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Mengacu pada Tabel 3, seluruh variabel bebas dalam model ini menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah ambang batas 10, yang menandakan tidak adanya indikasi multikolinearitas. Secara spesifik, nilai VIF untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1,176; Dana Perimbangan sebesar 1,179; dan P-SiLPA sebesar 1,003. Selain itu, nilai Tolerance untuk masing-masing variabel juga melampaui batas minimum 0,10, dengan rincian PAD sebesar 0,850, Dana Perimbangan sebesar 0,848, dan P-SiLPA sebesar 0,997. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang dibangun.

Uji multikolinearitas sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana antar variabel independen memiliki korelasi tinggi yang dapat memengaruhi kestabilan model. Dalam sebuah model regresi yang baik, setiap variabel bebas harus mampu berdiri sendiri dan tidak saling bergantung secara signifikan. Jika terjadi multikolinearitas, maka hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan rentan menimbulkan interpretasi yang keliru. Oleh karena itu, tidak ditemukannya multikolinearitas di dalam model ini menunjukkan bahwa setiap variabel dapat berkontribusi secara independen dalam menjelaskan variasi pada variabel



dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	13.601	8.878	1.532	.132
	LN_X1	.050	.111	.070	.654
	LN_X2	-.513	.329	-.240	.126
	LN_X3	.033	.035	.135	.347

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai probabilitas untuk masing-masing variabel sebesar 0,654; 0,126; dan 0,347. Ketiga nilai ini seluruhnya berada di atas ambang signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa ketiga model regresi itu tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model tersebut telah sudah dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana penyebaran nilai residual memiliki varians yang relatif sama pada seluruh tingkat variabel independen.

Kondisi ini sangat penting dalam regresi klasik karena menjamin bahwa estimasi koefisien yang diperoleh bersifat efisien dan tidak bias. Oleh sebab itulah, dapat untuk disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian ini valid dari aspek kestabilan varians residual, dan layak untuk dijadikan dasar dalam proses interpretasi hasil dan pengambilan keputusan.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.677 ^a	.459	.424	1.55334	1.810

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan dari analisis regresi adalah sebesar 1,810. Dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah observasi

sebanyak 50 ($n = 50$), dan tiga variabel bebas ($k = 3$), maka mengacu pada tabel kritis *Durbin-Watson*, diperoleh nilai batas bawah (d_L) sebesar 1,4206 dan batas atas (d_U) sebesar 1,6739. Karena nilai DW yang diperoleh (1,810) lebih tinggi dari batas atas ($d_U = 1,6739$) namun tetap berada di bawah angka $4 - d_U$ (2,3261), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa residual dalam model bersifat independen satu sama lain, sehingga asumsi klasik mengenai non-autokorelasi telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam proses analisis lanjutan dan pengambilan kesimpulan yang lebih valid.

Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	-57.217	14.386		-3.977	<.001
	LN_X1	.196	.180	.128	3.086	.020
	LN_X2	3.076	.534	.679	5.761	<.001
	LN_X3	-.098	.057	-.188	-1.734	.090

a. Dependent Variable: LN_Y1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Adapun hasil pengolahan yang diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -57.217 + .196X_1 + 3.076X_2 + -.098X_3 + e$$

Berikut penjelasan hasil persamaan regresi linear berganda:

Hasil estimasi dari model regresi menghasilkan nilai konstanta (intersep) sebesar -57,217. Angka ini mengisyaratkan bahwa jika seluruh variabel bebas, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA), bernilai nol, maka Belanja Bantuan Sosial diprediksi akan bernilai negatif sebesar -57,217. Meskipun secara praktis nilai negatif ini tidak mungkin terjadi dalam praktik anggaran daerah, secara ekonometrik hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang bersumber dari variabel lain di luar model yang berperan dalam pembentukan nilai belanja sosial.

Untuk Koefisien regresi pada variabel PAD (b_1) sebesar yaitu 0,196 mengimplikasikan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% dapat meningkatkan Belanja Bantuan Sosial sebesar

0,196%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan anggaran sosial. Sementara itu, Dana Perimbangan (b_2) memiliki koefisien sebesar 3,076, yang berarti bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Bantuan Sosial sebesar 3,076%, dengan kondisi variabel lain tidak berubah. Ini mencerminkan peran penting transfer fiskal dari pemerintah pusat dalam memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, khususnya untuk mendanai program kesejahteraan sosial.

Berbeda halnya dengan kedua variabel tersebut, P-SiLPA (b_3) memperlihatkan koefisien regresi negatif senilai -0,098. Dengan kata lain, peningkatan P-SiLPA sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,098%, dengan catatan variabel lainnya tetap. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya belum tentu dimanfaatkan langsung dalam pembiayaan program sosial di tahun berjalan, mengingat adanya kendala administratif maupun kebijakan dalam penggunaannya.

Secara keseluruhan, model regresi yang dikembangkan memperlihatkan peran variabel independen yang beragam baik memperkuat maupun melemahkan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Hasil ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh instrumen fiskal terhadap pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran sosial di lingkungan pemerintah daerah.

Pengujian Secara Parsial (UJI t)

Tabel 7. Hasil Uji Secara Parsial

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.			
		Unstandardized Coefficients							
		B	Std. Error						
1	(Constant)	-57.217	14.386		-3.977	<.001			
	LN_X1	.196	.180	.128	3.086	.020			
	LN_X2	3.076	.534	.679	5.761	<.001			
	LN_X3	-.098	.057	-.188	-1.734	.090			

a. Dependent Variable: LN_Y1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Tabel 7, variabel PAD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,020, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05 ($0,020 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik, PAD memiliki pengaruh yang signifikan



terhadap Belanja Bantuan Sosial. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil uji t, di mana nilai t-hitung sebesar 3,086 lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 2,0129 ($3,086 > 2,0129$). Oleh karena itu, hipotesis alternatif pertama (H_1) dapat diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Bantuan Sosial. Semakin besar penerimaan PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin luas pula kemampuan fiskalnya untuk membiayai program-program bantuan sosial. Temuan ini mencerminkan pentingnya PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah, di mana kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam aspek perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada data yang disajikan dalam Tabel 7, variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hasil ini diperkuat oleh nilai t-hitung sebesar 5,761, yang secara statistik lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,0129 ($5,761 > 2,0129$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial secara parsial.

Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) terbukti dapat diterima. Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan Dana Perimbangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat turut memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi utama Dana Perimbangan, yaitu sebagai instrumen transfer fiskal untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah serta mendukung penyelenggaraan layanan publik, termasuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat di tingkat lokal.

Pengaruh P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial

P Variabel Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA/ X_3) menghasilkan nilai t-hitung sebesar -1,734, yang lebih rendah dibandingkan t-tabel sebesar 2,0129 ($-1,734 < 2,0129$). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,090 melebihi ambang batas 0,05 ($0,090 > 0,05$). Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga (H_3) tidak dapat diterima. Artinya, secara parsial P-SiLPA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial (Y), baik dalam arah positif maupun negatif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dana sisa anggaran dari tahun sebelumnya belum berperan signifikan dalam menentukan besarnya alokasi untuk belanja bantuan sosial. Hal ini dapat diperjelas oleh kenyataan bahwa pemanfaatan P-SiLPA memerlukan prosedur perencanaan ulang melalui mekanisme penganggaran baru yang umumnya direalisasikan pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan demikian, meskipun secara nominal P-SiLPA menunjukkan ketersediaan dana, keberadaannya tidak serta-merta memengaruhi kebijakan belanja sosial pada tahun berjalan.

Pengujian Secara Simultan (Uji f)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.148	3	31.383	13.006	<,001 ^b
	Residual	110.991	46	2.413		
	Total	205.139	49			

a. Dependent Variable: LN_Y1

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pengujian menggunakan uji F ini dilakukan guna untuk menilai apakah secara simultan ketiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD/X₁), Dana Perimbangan (X₂), dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA/X₃), secara kolektif berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni Belanja Bantuan Sosial (Y). Dalam pengujian ini, hipotesis alternatif (H₄) dinyatakan diterima apabila nilai F-hitung melebihi nilai F-tabel, yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas memiliki kontribusi signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai F-hitung sebesar 13,006 dengan nilai signifikansi 0,001. Adapun derajat kebebasan untuk pembilang (df₁) adalah 3, sesuai dengan jumlah variabel independen dalam model, sedangkan untuk penyebut (df₂) adalah 46, yang merupakan hasil pengurangan dari total jumlah observasi (n = 50) dikurangi jumlah variabel independen dan satu (n – k – 1). Merujuk pada distribusi F, nilai F-tabel yang digunakan sebagai pembanding adalah sebesar 2,81.

Karena F-hitung (13,006) lebih besar dari F-tabel (2,81), serta nilai signifikansi yang diperoleh (0,001) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis keempat (H₄) dinyatakan diterima. Dengan demikian pulalah dapat ditarik sebuah simpulan bahwa secara simultan PAD, Dana Perimbangan, dan P-SiLPA memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan layak

1205



dan dapat diandalkan dalam menjelaskan pengaruh gabungan dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen di tingkat pemerintah provinsi pada wilayah Sumatera.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Dterminasi (R2)

Model	R	R Square	Model Summary ^b		Durbin-Watson
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.677 ^a	.459	.424	1.55334	1.810

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y1

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pengujian terhadap koefisien determinasi menghasilkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,677. Angka ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel-variabel independen dan variabel dependen yang terdapat dalam model yang digunakan. Karena nilai R tersebut mendekati angka maksimum dalam skala 0 sampai 1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggambarkan keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) dengan Belanja Bantuan Sosial.

Di samping itu, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,424 mengindikasikan bahwa sekitar 42,4% variasi dalam Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini. Adapun sisanya, yakni sebesar 57,6%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun model ini memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, masih terdapat sejumlah variabel eksternal lainnya yang turut memengaruhi besaran alokasi belanja bantuan sosial di tingkat pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t), PAD memiliki nilai t-hitung sebesar 3,086, lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,0129. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima, yang berarti PAD secara parsial berpengaruh atau memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Hasil ini menegaskan bahwa PAD merupakan indikator utama dalam

mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin kuat pula kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan program bantuan sosial, tanpa bergantung secara penuh kepada transfer dana dari pemerintah pusat.

Peningkatan PAD memberi ruang fiscal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja sosial secara lebih efektif. Dalam konteks desentralisasi fiskal, PAD memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan melalui belanja bantuan sosial. Hal ini sejalan dan sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman dalam *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*, yang menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan belanja publik akan mengikuti peningkatan pendapatan public juga.

Selain itu, Nasir, H. M. (2020, hal. 134) menegaskan bahwa “PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian daerah. Semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, seperti belanja sosial yang bersifat langsung menyentuh masyarakat.” PAD yang tinggi tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal, tetapi juga menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya.

Secara praktis, PAD memberikan dasar perencanaan yang kuat dalam penyusunan anggaran belanja, termasuk belanja sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD memungkinkan daerah merancang kebijakan yang lebih mandiri, adaptif, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Amran & Darwanis (2015), Fauzi & Darwanis (2014), Fatimah & Nopiyanti (2019), serta Sofiyani & Subadriyah (2020), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja bantuan sosial di daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t-hitung sebesar 5,761, yang lebih tinggi dari nilai t-tabel sebesar 2,0129. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima. Ini berarti bahwa secara parsial, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama cakupan periode 2019–2023. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pening-



katan Dana Perimbangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat berpotensi memperbesar kapasitas fiskal daerah dalam mengalokasikan belanja, termasuk untuk program bantuan sosial yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dana Perimbangan merupakan mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan secara langsung memperluas ruang fiskal daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran, termasuk kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itulah, semakin besar Dana Perimbangan yang diterima oleh suatu daerah, semakin tinggi pulalah kemungkinan pemerintah daerah mampu membiayai Belanja Bantuan Sosial sebagai bagian integral dari pengeluaran daerah.

Hasil ini sejalan dengan konsep dalam teori Desentralisasi Fiskal, yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, semakin tinggi Dana Perimbangan yang diperoleh oleh suatu daerah, maka semakin besar pula peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas Belanja Bantuan Sosial guna menjawab tuntutan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Hasil ini konsisten dengan temuan dari Fauzi & Darwanis, (2014), Mala & Kurnia, (2017), Simanjuntak & Ginting, (2019), serta Sofiyani & Subadriyah, (2020), yang secara umum menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Pengaruh P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel P-SiLPA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Ketiadaan hubungan yang bermakna antara P-SiLPA dan Belanja Bantuan Sosial menandakan bahwa dana sisa dari anggaran tahun berjalan ini tidak berdampak langsung terhadap pengalokasian anggaran sosial daerah. P-SiLPA, atau Perubahan-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, merupakan dana yang belum terealisasi penggunaannya dalam tahun anggaran berjalan, dan pada dasarnya tidak dapat secara langsung digunakan sebagai pembiayaan untuk belanja tahun yang sama. Penggunaan dana tersebut memerlukan proses perencanaan ulang dan persetujuan dalam dokumen anggaran resmi, sehingga tidak serta-merta dapat dimanfaatkan untuk Bansos.

Lebih lanjut, Belanja Bantuan Sosial merupakan kategori belanja yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan politik. Selain itu, faktor-faktor internal seperti ketidakstabilan anggaran, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, dan kurangnya transparansi dalam pengeluaran juga dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas Belanja Bantuan Sosial.



ruhi oleh pertimbangan kebijakan dan keputusan politis. Dengan demikian, meskipun terdapat sisa anggaran (P-SiLPA), hal ini belum tentu dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan tambahan belanja bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Halim, (2007, hlm. 89) dalam bukunya Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “SiLPA bukan merupakan bagian dari penerimaan definitif, melainkan bagian dari sisa perhitungan yang penggunaannya sangat terbatas dan harus mendapat persetujuan melalui APBD tahun berikutnya. Oleh karena itu, SiLPA tidak dapat digunakan secara langsung untuk belanja tertentu, termasuk bantuan sosial.” Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fibriana, (2017) serta Marlina, Prasetyo & Yulianto, (2022), yang juga menyatakan bahwa P-SiLPA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 13,006. Untuk menentukan nilai dari F-tabel, digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) untuk pembilang (numerator) sebesar 3 yang merupakan hasil pengurangan jumlah variabel independen dan satu ($4 - 1$) dan df untuk penyebut (denominator) sebesar 46, yang diperoleh dari jumlah sampel ($n = 50$) dikurangi jumlah variable independen ($k = 3$) dan satu ($50 - 3 - 1 = 46$). Berdasarkan distribusi F, nilai F-tabel yang di dapatkan adalah sebesar 2,81.

Karena F-hitung ($13,006 > 2,81$), maka hipotesis keempat (H_4) dinyatakan diterima. Dukungan tambahan diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan P-SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kontribusi Belanja Bantuan Sosial di provinsi-provinsi yang berada di wilayah Pulau Sumatera.

Besarnya pengaruh dari ketiga variabel independen itu terhadap variabel dependen juga tercermin dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,424. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 42,4% variasi pada kontribusi Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan oleh PAD, Dana Perimbangan, dan P-SiLPA dalam model regresi yang digunakan. Adapun sisanya, yaitu sebesar 57,6%, dijelaskan oleh variabel lain di luar cakupan model dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial di daerah

1209

sangat dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat PAD yang tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih luas, sehingga mampu mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk mendanai program-program bantuan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa PAD merupakan indikator kunci dalam menilai kemandirian dan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan demikian, kemandirian fiskal yang tercermin dari besarnya PAD menjadi elemen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat lokal. Selain PAD, hasil pada penelitian ini juga menunjukkan ternyata Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah pusat melalui mekanisme transfer dana tetap menjadi instrumen strategis dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Mengingat Dana Perimbangan merupakan salah satu pilar utama dalam struktur pendapatan daerah, maka dibutuhkan sinergi dan koordinasi fiskal yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan dan efektivitas program bantuan sosial. Sementara itu, variabel Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Meskipun secara teoritis P-SiLPA mencerminkan sisa anggaran dari tahun sebelumnya, hasil temuan menunjukkan bahwa dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk membiayai program sosial pada tahun anggaran berjalan.

Besar kemungkinan, P-SiLPA lebih dimanfaatkan untuk menutup defisit atau dialokasikan pada pos belanja lain yang lebih prioritas. Ketidaksignifikansi P-SiLPA juga dapat mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran, terutama dalam pengalokasian belanja sosial, belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi sisa anggaran tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa sumber pendapatan yang bersifat reguler dan terencana, seperti PAD dan Dana Perimbangan, lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan fiskal terkait belanja bantuan sosial dibandingkan dengan dana yang bersifat residual seperti P-SiLPA. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendapatan daerah, perencanaan fiskal yang matang, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat guna menjamin kebijakan belanja sosial yang berkelanjutan dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press.
- Fauzi, D. dkk. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7, 76–92.
- Halim & kusufi. (2018). Akuntansi Sektor Publik:Teori, Konsep, dan Aplikasi. Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi, 2012:21. (2012). Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 81/PMK.05/2012 Mengatur Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (2012).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial , Pub. L. No. 1 (2019).
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Pub. L. No. 32 (2011).
- Rafli, S. (2021). Pengaruh PAD, SiLPA dan Fiscall Stress Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerinatah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3, 486–500.
- Simanjuntak, G. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5, 183–194.
- Sofiyani, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 4, 33–47.
- Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).